

## **ABSTRACT**

*Tax is the most important thing for every country, it as one of income sources in countries budget. To support smoothness of this activity, government hope all of their citizen who already have income for being participant in government expenditure. But in implementation, many companies avoid their tax duties, due to tax payment is a cost for companies. Many things do by companies to minimalism their tax expend. Companies effort to minimalism their tax expend is known as Tax Planning. Commonly, Tax Planning process reconcile to business engineer and tax transaction to made tax credit in minimal amount but still on taxes rules.*

*This research aimed to explain methods which can be used in Tax Planning and also the implication on income and income taxes rules section 21<sup>st</sup> for employees from Tax Planning of income taxes in CV. PURI'S, for then can be known how many changes happened on CV. PURI'S tax credit after Tax Planning of income taxes rules section 21<sup>st</sup> applied.*

*Based on researcher analyze, can be known after applied Tax Planning by giving transport, health, and tax allowance to the employee in gross up framework, CV. PURI's tax credit have been decreasing for Rp 16.626.680,00 from before Tax Planning applied is Rp 29.483.160,00 become Rp 12.856.480,00.*

*Keywords : Tax, Tax Planning, income taxes rules section 21<sup>st</sup>, Transport Allowance, Health Allowance, Tax Allowance.*

## ABSTRAK

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam setiap negara yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan dalam anggaran suatu negara. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, Negara mengharapkan semua warganya yang sudah memiliki penghasilan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan negara. Namun dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan yang menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena pembayarannya merupakan beban bagi perusahaan. Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi jumlah pembayaran pajaknya. Upaya meminimalisasi beban pajak ini disebut dengan istilah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Umumnya proses perencanaan pajak tersebut merujuk pada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka perencanaan pajak serta dampak yang timbul terhadap penghasilan dan PPh Pasal 21 karyawan dari perencanaan pajak PPh Pasal 21 di CV. PURI'S, untuk kemudian dapat diketahui seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap pajak terhutang CV. PURI'S setelah dilakukan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21.

Berdasarkan hasil analisis penulis, diketahui bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak yaitu dengan memberikan tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, serta tunjangan pajak kepada karyawannya dalam rangka *gross up*, besarnya pajak terhutang CV.PURI'S mengalami penurunan sebesar Rp. 16.626.680,00 yang sebelum dilakukannya perencanaan pajak sebesar Rp 29.483.160 menjadi Rp 12.856.480,00.

Kata-kata kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Pajak.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Pengertian Analisis.....	7
2.1.2 Perpajakan.....	7
2.1.2.1 Pengertian Perpajakan.....	7

2.1.2.2 Ciri-Ciri Pajak.....	8
2.1.2.3 Fungsi Pajak.....	9
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.1.2.5 Asas Pemungutan Pajak.....	11
2.1.2.6 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	11
2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.2.8 Penegelompokkan Pajak.....	13
2.1.2.9 Tarif Pajak.....	14
2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh).....	15
2.1.3.1 Subjek PPh.....	15
2.1.3.2 Objek PPh.....	17
2.1.3.3 Tarif PPh.....	20
2.1.3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	20
2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	21
2.1.4.1 Pemotong Pajak PPh Pasal 21.....	22
2.1.4.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	23
2.1.4.3 Objek Pajak PPh Pasal 21.....	25
2.1.4.4 Kewajiban Dan Hak Pemotong Pajak.....	28
2.1.5 Manajemen Pajak.....	30
2.1.5.1 Definisi Manajemen Pajak.....	30
2.1.5.2 Tujuan Manajemen Pajak.....	31
2.1.5.3 Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	31

2.1.5.4 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan ( <i>Tax Implementation</i> ).....	32
2.1.5.5 Pengendalian Pajak ( <i>Tax Control</i> ).....	33
2.1.5.6 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	33
2.1.5.7 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	36
2.2 Kerangka Pemikiran.....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	40
3.1.1 Objek Penelitian.....	41
3.1.2 Strategi Pengumpulan Data Dan Sumber Data.....	42
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.1.4 Langkah-Langkah Analisis Perbandingan Pajak Terutang Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Perencanaan Pajak.....	44

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum CV. PURI'S.....	45
4.1.2 Sejarah Umum CV. PURI'S.....	46
4.1.3 Visi Dan Misi CV. PURI'S.....	47
4.1.4 Jaringan Pemasaran CV. PURI'S.....	48
4.1.5 Kegiatan Sumber Daya Manusia.....	49
4.1.6 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas.....	49

4.2 Pembahasan.....	52
4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Kebijakan CV. PURI'S.....	52
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menerapkan Alternatif Kebijakan Perpajakan Baru.....	58
4.2.2.1 Alternatif-Alternatif Berkenaan Dengan PPh Pasal 21 Karyawan.....	59
4.2.2.2 Kebijakan-Kebijakan Berkenaan Dengan Transportasi Karyawan.....	60
4.2.2.3 Kebijakan-Kebijakan Berkenaan Dengan Kesehatan Karyawan.....	61
4.2.2.4 Pemilihan Alternatif Kebijakan Perpajakan Untuk CV. PURI'S.....	62
4.2.3 Perhitungan Harga Pokok Penjualan Dengan Kebijakan Lama.....	68
4.2.4 Perhitungan Harga Pokok Penjualan Dengan Kebijakan Baru.....	69
4.2.5 Perhitungan Laporan Laba-Rugi Dengan Kebijakan Lama.....	70
4.2.6 Perhitungan Laporan Laba-Rugi Dengan Kebijakan Baru.....	71
4.2.7 Analisis Pajak Terutang Perusahaan Dengan Diterapkannya Alternatif Kebijakan Baru.....	72
4.2.8 Perbandingan Pajak Terutang Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Perencanaan Pajak PPh Pasal 21.....	72

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS ( <i>CURRICULUM VITAE</i> ).....	78

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Daftar Penjualan Bruto CV.PURI'S (Selama 5 Tahun) .....4
Tabel 2.1	Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....20
Tabel 4.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan (Direksi dan Staff) Sebelum Perencanaan Pajak.....54
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan (Tenaga Kerja Langsung) Sebelum Perencanaan Pajak.....55
Tabel 4.2 (Lanjutan)	Perhitungan PPh Pasl 21 Karyawan (Tenaga Kerja Langsung) Sebelum Perencanaan Pajak.....56
Tabel 4.2 (Lanjutan)	Perhitungan PPh Pasl 21 Karyawan (Tenaga Kerja Langsung) Sebelum Perencanaan Pajak.....57
Tabel 4.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan (Direksi dan Staff) Sesudah Perencanaan Pajak.....64
Tabel 4.4	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan (Tenaga Kerja Langsung) Sesudah Perencanaan Pajak.....65
Tabel 4.4 (Lanjutan)	Perhitungan PPh Pasl 21 Karyawan (Tenaga Kerja Langsung) Sesudah Perencanaan Pajak.....66
Tabel 4.4 (Lanjutan)	Perhitungan PPh Pasl 21 Karyawan (Tenaga Kerja Langsung) Sesudah Perencanaan Pajak.....67
Tabel 4.5	Harga Pokok Penjualan.....68
Tabel 4.6	Harga Pokok Penjualan.....69
Tabel 4.7	Laporan Laba-Rugi.....70
Tabel 4.8	Laporan Laba-Rugi.....71



Tabel 4.9 Perhitungan Laba Setelah Pajak CV. PURI'S.....72